

DAMPAK KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI D. I. YOGYAKARTA 2001-2017*

Simulasi dengan Analisis Sistem Persamaan Simultan

Anissa Dika Larasati^{1‡} and Vera Lisna²

¹BPS Kabupaten Bangka Tengah, Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia, anissa.dika@bps.go.id

²Pusdiklat BPS, Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia, veralisna@bps.go.id

[‡]corresponding author

Indonesian Journal of Statistics and Its Applications (eISSN:2599-0802)

Vol 4 No 4 (2020), 604 - 614

Copyright © 2020 Anissa Dika Larasati and Vera Lisna. This is an open-access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Abstract

Economic development includes increasing economic growth and alleviating poverty. D.I Yogyakarta is a province with the lowest economic growth and per capita income compared to other provinces in Java. Besides, it has the highest poverty rate. With this condition, it is feared that economic development and economic contribution in D.I Yogyakarta which are relatively low are difficult to increase. This study aims to analyze the simultaneous relationship between indicators of economic development in the province of D.I Yogyakarta, explores the variables that influence it, and perform policy simulations to improve economic development. The indicators used to describe economic growth in this study are Regional Gross Domestic Product (regional GDP), household consumption, and community savings in banks. While the indicators that are used to reflect the poverty level are the percentage of poor people. The estimation method used is simultaneous Two-Stage Least Squares (2SLS) equation system which consisted of three structural equation and one identity equation using the historical data from the year 2001-2017. The results of the simulation show a 6% increase in government expenditure can improve economic growth to 5.41% and reduce the percentage of poor people by 0.41% points.

Keywords: economic development, policy simulation, simultaneous equations.

1. Pendahuluan

Pembangunan ekonomi mencakup beberapa aspek diantaranya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pembangunan ekonomi di

* Received Apr 2020; Accepted Nov 2020; Published online on Nov 2020

negara berkembang masih dipengaruhi oleh variabel makroekonomi. Menurut Keynes dalam Sukirno (2004), konsumsi atau pengeluaran agregat masyarakat akan barang dan jasa merupakan penentu utama prestasi ekonomi suatu negara. Selain itu, perilaku ekonomi dalam jangka Panjang ataupun jangka pendek dipengaruhi oleh keputusan konsumsi rumah tangga (Mankiw, 2003). Konsumsi rumah tangga dalam perekonomian, akan berpengaruh pada kestabilan variabel-variabel makroekonomi lain. Struktur PDRB D.I. Yogyakarta menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku tahun 2017 menunjukkan bahwa perekonomian D.I. Yogyakarta digerakkan oleh konsumsi rumah tangga dengan porsi sebesar 68,55 persen tumbuh lambat dibawah konsumsi LNPRT, PMTB, perubahan inventori, ekspor luar negeri, dan impor luar negeri dalam kurun lima tahun terakhir ([PEMDA DIY], 2013). Isu melemahnya daya beli sepanjang tahun 2017 dianggap krusial dilihat dari kontribusinya terhadap perekonomian. Dalam jangka panjang, pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh pola konsumsi rumah tangga (Sukirno dalam Sangaji, 2009). Dengan share kontribusi yang lebih dari dua pertiga PDRB, pengeluaran konsumsi rumah tangga menjadi penentu pertumbuhan ekonomi D.I. Yogyakarta.

Di sisi lain, Pulau Jawa sebagai penyokong PDB Indonesia terus berkembang dalam perekonomiannya. Di mana kontribusi PDRB Pulau Jawa terhadap total PDB nasional sebesar 58,49 persen pada tahun 2017 merupakan yang terbesar dibanding wilayah lain. Namun, jika dilihat dari kontribusi PDRB D.I. Yogyakarta baik terhadap pulau Jawa maupun nasional, proporsinya relatif kecil. Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi D.I Yogyakarta yang relatif stabil, ternyata belum mampu meningkatkan kontribusi Provinsi D.I Yogyakarta terhadap perekonomian Pulau Jawa maupun nasional. Laju pertumbuhan Provinsi D.I Yogyakarta masih berada di bawah laju Pulau Jawa maupun nasional juga belum mampu menekan angka kemiskinan secara masif, sehingga kesejahteraan masyarakat masih tergolong kurang. Tercatat, persentase penduduk miskin D.I. Yogyakarta tahun 2010 sebesar 16,83 persen dan hingga tahun 2017 berhasil turun mencapai angka 12,36 persen. Namun, angka tersebut masih berada di atas angka kemiskinan nasional 10,12 persen pada tahun 2017. Ditambah lagi penurunan tersebut masih jauh di atas target yang direncanakan pada RPJMD 2013-2017 Provinsi D.I Yogyakarta. Salah satu faktor yang membatasi kapabilitas dalam menghasilkan output yang bernilai ekonomi adalah kemiskinan.

Berdasarkan uraian mengenai beberapa permasalahan yang ada pada Provinsi D.I Yogyakarta beberapa tahun terakhir, penelitian ini akan berfokus untuk mengkaji kondisi perekonomian Provinsi D.I Yogyakarta tahun 2001 sampai dengan 2017, menentukan faktor-faktor makroekonomi yang berpengaruh terhadap indikator pembangunan ekonomi serta melakukan analisis simulasi kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi.

2. Metodologi

2.1 Bahan dan Data

Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya fungsi konsumsi John Maynard Keynes yang menyatakan bahwa konsumsi dipengaruhi oleh pendapatan saat ini (Mankiw, 2003). Berdasarkan pernyataan tersebut, fungsi konsumsi Keynes dapat dituliskan sebagai berikut:

$$C = f(Y_d) \quad (1)$$

dalam hal ini, C merupakan konsumsi sedangkan Y_d merupakan pendapatan disposabel. Dalam teori konsumsi Keynes, dikatakan ketika pendapatan naik, maka konsumsi juga meningkat namun dengan jumlah yang lebih sedikit (Muana, 2005). Hal ini mengindikasikan bahwa konsumsi tidak hanya dipengaruhi oleh pendapatan tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor makroekonomi lain. Keynes juga mengatakan bahwa kebijakan fiskal yang diterapkan oleh pembuat kebijakan bersumber dari hubungan antara pendapatan dan konsumsi.

Teori Keynes mengenai kecenderungan mengkonsumsi, secara eksplisit juga menggambarkan hubungan antara tabungan dan pendapatan, yaitu pendapatan dapat dikatakan sebagai salah satu faktor yang memengaruhi tabungan. Dalam hal ini, jika terjadi peningkatan terhadap pendapatan riil, maka kecenderungan seseorang untuk menambah pengeluarannya tentu tidak sebesar penambahan pendapatan yang ia terima, namun masih terdapat sisa pendapatan yang tidak dikonsumsi dan digunakan untuk menabung. Sehingga hal ini dapat dijelaskan melalui persamaan berikut:

$$S = Y - C \quad (2)$$

dalam hal ini, S merupakan tabungan dan Y merupakan pendapatan. Keynes juga berpendapat bahwa tabungan merupakan simbol dari kemewahan yang berarti orang kaya akan memiliki proporsi tabungan terhadap pendapatan yang lebih tinggi daripada orang kurang mampu. Pada model pertumbuhan Solow (*Solow growth model*), tabungan merupakan faktor penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Tabungan yang tinggi mengindikasikan tingginya persediaan modal sehingga akan memengaruhi tingkat output yang selanjutnya memperbaiki keadaan perekonomian (Mankiw, 2003).

Penelitian ini berisi tentang kajian mengenai analisis dampak variabel makroekonomi terhadap indikator pembangunan ekonomi di Provinsi D.I Yogyakarta. Data deret waktu tahun 2001 sampai dengan 2017 digunakan untuk mengkaji pengaruh timbal balik antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), konsumsi rumah tangga, tabungan masyarakat di bank, serta persentase penduduk miskin di Provinsi D.I Yogyakarta. Selain itu, penelitian ini menganalisis pengaruh berbagai variabel terhadap konsumsi rumah tangga, tabungan masyarakat dan persentase penduduk miskin di Provinsi D.I Yogyakarta serta akan dilakukan simulasi perubahan (*shock*) variabel eksogen yang nantinya mempengaruhi masing-masing variabel endogen.

Data yang digunakan yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), konsumsi rumah tangga, tabungan masyarakat di bank, pengeluaran pemerintah, variabel lain penyusun PDRB, inflasi, rata-rata harga beras, penerimaan pajak, persentase penduduk miskin serta tingkat pengangguran terbuka. Keseluruhan data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari publikasi BPS D.I Yogyakarta serta Bank Indonesia dari tahun 2001 sampai 2017. Data yang digunakan merupakan data yang sudah diinflasikan atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2010 dengan menggunakan deflator IHK.

2.2 Metode Penelitian

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis inferensia. Analisis deskriptif digunakan dalam pembuatan grafik untuk mengetahui gambaran perekonomian dan kemiskinan di Provinsi D.I Yogyakarta tahun 2001 sampai dengan 2017. Sementara analisis inferensia digunakan untuk mengestimasi parameter, pengujian asumsi klasik, pengujian keberartian model, validasi serta simulasi.

- Spesifikasi Model

Sistem persamaan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga persamaan struktural dan satu persamaan identitas yang disusun berdasarkan teori-teori ekonomi yang relevan dengan tujuan penelitian serta penelitian terkait (lihat Irhamni, 2018; Maulidah & Soejoto, 2017; Ningsih et al., 2013; Sitanggang, 2013; Tusianti, 2018).

Berikut spesifikasi model yang digunakan dalam penelitian ini:

$$Y_t = K_t + TAB_t + L_t \quad (3)$$

$$K_t = \alpha_0 + \alpha_1 Y_t + \alpha_2 INF_t + \alpha_3 K_{t-1} + \alpha_4 T_t + \varepsilon_{1t} \quad (4)$$

$$TAB_t = \beta_0 + \beta_1 K_t + \beta_2 BRS_t + \beta_3 MSK_t + \varepsilon_{2t} \quad (5)$$

$$MSK_t = \gamma_0 + \gamma_1 K_t + \gamma_2 G_t + \gamma_3 TPT_t + \varepsilon_{3t} \quad (6)$$

Keterangan:

Y_t : PDRB (Miliar Rp.)

K_t : Konsumsi Rumah Tangga (Miliar Rp.)

TAB_t : Jumlah Tabungan Masyarakat di Bank (Miliar Rp.)

L_t : Komponen lain penyusun PDRB (Miliar Rp.)

G_t : Pengeluaran Pemerintahan (Miliar Rp.)

T_t : Hasil Pajak Daerah (Miliar Rp.)

INF_t : Inflasi (%)

BRS_t : Rata – rata Harga Beras (Rp.)

MSK_t : Persentase Penduduk Miskin (%)

TPT_t : Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

ε_{it} : *Error term* model ke – i

t : tahun (2001 – 2017)

- Identifikasi Model

Identifikasi model persamaan simultan dilakukan untuk mengetahui metode yang paling tepat untuk menyelesaikan sistem persamaan simultan yang ada. Identifikasi model dapat melalui 2 cara, yaitu *order condition* dan *rank condition* (Gujarati & Porter, 2012). Kesimpulan yang dapat diambil dari identifikasi model berdasarkan *order condition* dan *rank condition* disajikan pada Tabel 1.

Dari hasil identifikasi *order* dan *rank condition* pada Tabel 1, dapat disimpulkan bahwa ketiga persamaan struktural yaitu persamaan konsumsi rumah tangga, tabungan masyarakat dan persentase penduduk miskin *overidentified*, maka metode yang digunakan dalam estimasi model adalah Metode *Two-Stage Least Square (2SLS)*.

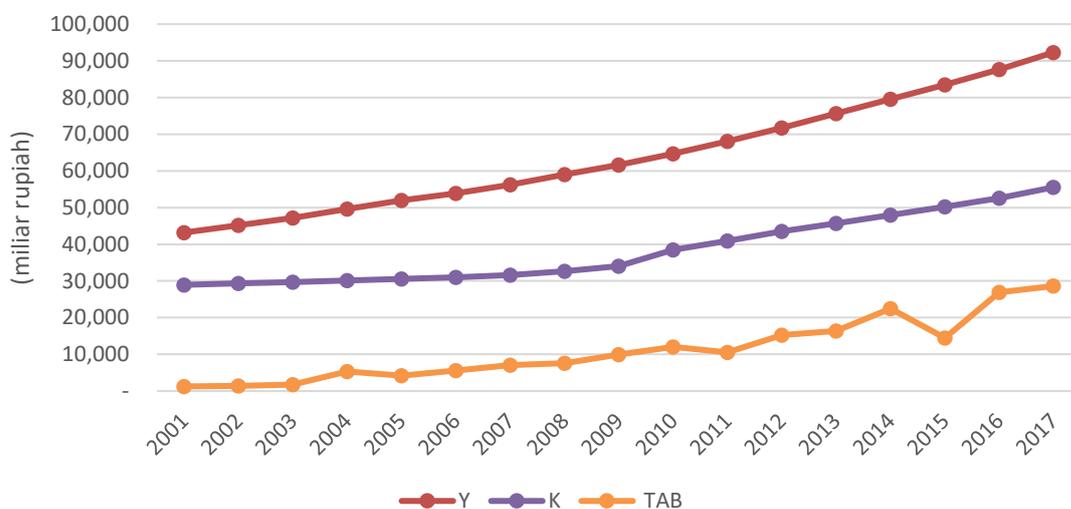
Tabel 1: Kesimpulan identifikasi model persamaan simultan.

Persamaan	Order Condition (K-k > m-1)	Rank Condition	Identifikasi
Konsumsi Rumah Tangga	4 > 1	Full Rank	Overidentified
Tabungan Masyarakat	6 > 2	Full Rank	Overidentified
Persentase Penduduk Miskin	5 > 1	Full Rank	Overidentified

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Gambaran Umum PDRB, Konsumsi Rumah Tangga dan Tabungan Masyarakat Provinsi D.I Yogyakarta tahun 2001-2017

Secara umum nilai dari Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi D.I Yogyakarta pada Gambar 1 mengalami *trend* meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menandakan bahwa perekonomian Provinsi D.I Yogyakarta mengalami peningkatan tiap tahunnya walaupun peningkatan tersebut masih tergolong rendah jika dibandingkan provinsi lain di Pulau Jawa.



Gambar 1: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), konsumsi rumah tangga, tabungan masyarakat di Provinsi D.I Yogyakarta tahun 2001-2017.

Konsumsi rumah tangga mendominasi kontribusi pertumbuhan ekonomi. Ditengah isu perlambatan daya beli masyarakat pada skala nasional, Provinsi D.I Yogyakarta mampu melakukan pencapaian yang baik dalam menjaga daya beli. Berdasarkan data BPS pada Gambar 1, pengeluaran konsumsi rumah tangga memiliki *trend* meningkat, hal ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut berasal dari kelompok masyarakat dengan pengeluaran

konsumsi perkapita perbulan lebih dari 500.000 rupiah. Sedangkan rumah tangga dengan golongan pengeluaran dibawah 300.000 rupiah mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Provinsi D.I Yogyakarta merupakan pertumbuhan ekonomi semu dan sebagian besar dinikmati oleh masyarakat berpendapatan tinggi atau yang berada di atas garis kemiskinan.

Dari Gambar 1 dapat dilihat bahwa peningkatan tabungan masih terjadi seiring dengan penambahan konsumsi rumah tangga. Tabungan yang disisihkan masyarakat berfungsi sebagai sumber investasi daerah. Semakin tinggi tingkat tabungan masyarakat maka semakin besar pula kemampuan suatu daerah untuk berinvestasi. Selanjutnya, peningkatan investasi ini akan menambah modal dan menghasilkan *multiplier effect* terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat. Menurut laporan Bank Indonesia, secara umum masyarakat Provinsi D.I Yogyakarta pada tahun 2017 menyisihkan sekitar 21,75 persen pendapatannya untuk ditabung. Angka tersebut mengalami peningkatan dari periode sebelumnya. Kecenderungan meningkatnya tabungan masyarakat dari waktu ke waktu mengindikasikan bahwa motif menabung sebagian besar masyarakat adalah untuk berjaga-jaga.

3.2 Gambaran Umum Persentase Penduduk Miskin Provinsi D.I Yogyakarta tahun 2001-2017

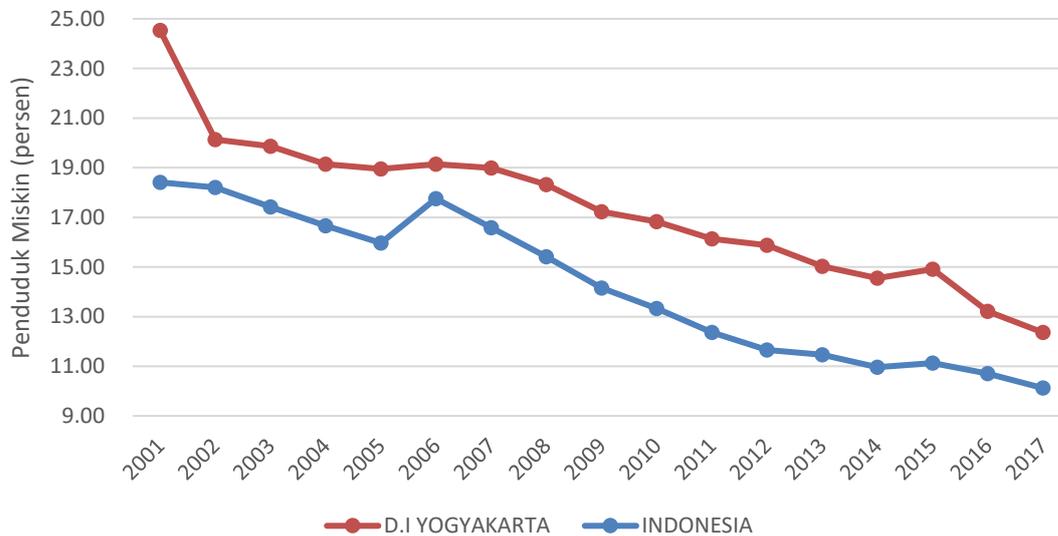
Selain mendorong aktivitas ekonomi, pengalokasian APBD Provinsi D.I Yogyakarta juga difokuskan pada penurunan angka kemiskinan. Dari Gambar 2, dapat dilihat bahwa secara bertahap, persentase penduduk miskin semakin menurun, hingga pada tahun 2017 mencapai angka 12,36 persen. Namun pencapaian ini masih di atas tingkat kemiskinan nasional, pertumbuhan pendapatan yang tidak diiringi oleh perbaikan distribusinya mengakibatkan penurunan kemiskinan yang lambat.

Tingkat kemiskinan di daerah pedesaan lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan, meski secara nominal jumlah penduduk miskin di perkotaan lebih tinggi dibandingkan di pedesaan. Tercatat, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2017 sebesar 11,00% dengan nominal jumlah penduduk miskin sebesar 298,39 ribu. Sementara di daerah pedesaan mencapai angka 15,86% dengan nominal jumlah penduduk miskin sebanyak 167,94 ribu.

- Hasil Evaluasi Model

Uji keberartian model dapat dilihat melalui nilai R^2 , $Adj-R^2$, Uji F (*Overall Test*) serta Uji T Parsial pada Tabel 2. Dari ketiga hasil probabilitas Uji *F-Statistic* dapat dilihat memiliki nilai yang sangat kecil dan kurang dari lima persen, sehingga dapat disimpulkan bahwa minimal terdapat satu variabel independen atau variabel bebas yang berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen konsumsi rumah tangga, tabungan masyarakat maupun persentase penduduk miskin dengan taraf uji lima persen. Dari hasil R^2 persamaan konsumsi rumah tangga sebesar 0,9972, berarti bahwa konsumsi rumah tangga tahun berjalan dapat dijelaskan oleh variabel bebasnya sebesar 99,72% sedangkan sisanya 0,28% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Sedangkan variabel endogen tabungan masyarakat dapat dijelaskan oleh variabel bebasnya sebesar 94,20%

sedangkan sisanya 5,80% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Selanjutnya, variabel persentase penduduk miskin dapat dijelaskan oleh variabel bebasnya sebesar 97,77% sedangkan sisanya 2,23% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.



Gambar 2: Persentase Penduduk Miskin di Provinsi D.I Yogyakarta tahun 2001-2017.

- Estimasi Model Persamaan Simultan

Estimasi model persamaan simultan yang didapatkan adalah sebagai berikut:

$$\hat{K}_t = -7508,118^* + 0,281899 Y_t^* + 162,0547 INF_t^* + 0,780294 K_{t-1}^* - 2,925455 T_t^* \quad (7)$$

$$\widehat{TAB}_t = 176253,6^* - 0,596786 K_t - 1,956620 BRS_t^* - 7615,772 MSK_t^* \quad (8)$$

$$\widehat{MSK}_t = 26,12725^* - 0,000143 K_t^* - 0,000435 G_t^* + 0,139719 TPT_t \quad (9)$$

Keterangan: *signifikan pada taraf uji 5 persen

Tabel 2: Ringkasan hasil uji keberartian model persamaan simultan.

Variabel Endogen	R^2	$Adj-R^2$	$Prob (F-Statistic)$
K	0,9972	0,9962	0,0000
TAB	0,9420	0,9275	0,0000
MSK	0,9777	0,9722	0,0000

Pada pengujian t parsial persamaan (7), variabel pendapatan, inflasi, konsumsi periode sebelumnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap

konsumsi rumah tangga. Setiap kenaikan 1 miliar rupiah pendapatan, akan menaikkan konsumsi rumah tangga sebesar 281,899 juta rupiah. Sedangkan penambahan inflasi sebesar 0,1 persen, akan menaikkan konsumsi rumah tangga sebesar 16,20547 miliar rupiah. Hal ini sesuai dengan penelitian Nur (2012) yang menyinggung mengenai teori ekspansi permintaan agregat, yaitu kenaikan harga atau inflasi akan mengakibatkan kenaikan permintaan agregat. Kenaikan konsumsi rumah tangga pada periode sebelumnya sebesar 1 miliar rupiah, maka konsumsi pada tahun berjalan akan naik sebesar 780,294 juta rupiah. Sedangkan, penerimaan pajak berpengaruh negatif dan signifikan, penambahan penerimaan pajak sebesar 1 miliar rupiah akan menurunkan konsumsi sebesar 2,925 miliar rupiah.

Selanjutnya pada persamaan (8), rata-rata harga beras dan persentase penduduk miskin berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tabungan masyarakat di bank. Setiap kenaikan 100 rupiah harga beras, akan mengurangi tabungan masyarakat sebanyak 195,6620 miliar rupiah. Sedangkan, setiap kenaikan persentase penduduk miskin sebesar 0,1 persen akan menurunkan jumlah tabungan masyarakat sebesar 761,5772 miliar rupiah. Pada persamaan (9), konsumsi rumah tangga dan pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persentase penduduk miskin. Setiap kenaikan 100 miliar konsumsi rumah tangga akan menurunkan persentase penduduk miskin sebesar 0,0143 persen. Dan setiap penambahan pengeluaran pemerintah sebesar 100 miliar akan menurunkan persentase penduduk miskin sebesar 0,0435 persen.

- Uji Asumsi Klasik

Dari hasil pengujian asumsi klasik pada Tabel 3, model yang terbentuk telah memenuhi asumsi ekonometrik yaitu normalitas, non-autokorelasi, dan homoskedastisitas. Pada Uji Normalitas *Jarque-Bera*, ketiga persamaan memiliki *p-value* lebih besar dari lima persen sehingga dapat disimpulkan ketiga persamaan memiliki residual data yang berdistribusi normal atau memenuhi asumsi normalitas. Pengujian autokorelasi menggunakan *Lagrange Multiplier Test (LM Test)* pada ketiga persamaan menghasilkan nilai *p-value* lebih dari lima persen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketiga persamaan yaitu persamaan konsumsi rumah tangga, tabungan masyarakat dan persentase penduduk miskin tidak memiliki masalah autokorelasi (non-autokorelasi). Terakhir, dilakukan pengujian homoskedastisitas dengan *Glejser Test*. Ketiga persamaan memiliki *p-value* lebih dari lima persen sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas atau dapat dikatakan memenuhi asumsi homoskedastisitas.

Tabel 3: Ringkasan hasil pengujian asumsi klasik persamaan simultan.

Persamaan	Uji	Uji	Uji
	Normalitas <i>p-value</i> (Jarque-Bera)	Autokorelasi <i>p-value</i> (LM Test)	Heteroskedastisitas <i>p-value</i> (Glejser-test)
Konsumsi Rumah Tangga	0,818	0,2251	0,1648
Tabungan Masyarakat	0,8576	0,4872	0,2391
Persentase Penduduk Miskin	0,4672	0,1563	0,4811

- Uji Validasi

Suatu simulasi dikatakan valid apabila komponen *U-Theil* yaitu *bias* (UM) dan *variance* (US) mendekati nilai nol, sedangkan *covariance* (UC) mendekati nilai satu. Dari Tabel 4, dapat dilihat komponen *U-Theil* yaitu komponen *bias* (UM), komponen *variance* (US) dan komponen *covariance* (UC) sesuai dengan ketentuan syarat simulasi. *Coef-U* dari ketiga persamaan mendekati nol, hal ini mengindikasikan bahwa simulasi yang dihasilkan dari model tersebut mengikuti nilai aktualnya dengan baik. Selain itu, nilai RMSPE cenderung kecil sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai prediksi yang didapat akan mengikuti kecenderungan data historisnya dengan tingkat kesalahan yang kecil.

Tabel 4: Ringkasan hasil uji validasi persamaan simultan.

Variabel Endogen	<i>U-Theil</i>				RMSPE
	UM	US	UC	<i>Coef-U</i>	
Y	0,00	0,02	0,98	0,0307	0,9183
K	0,00	0,00	0,99	0,0178	0,9741
TAB	0,00	0,00	0,99	0,0973	0,8813
MSK	0,00	0,00	1,00	0,0143	0,9572

- Simulasi

Pengeluaran pemerintah merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Pengeluaran pemerintah mempertimbangkan prinsip *value for money*, yaitu tidak hanya diukur dengan aspek efisiensi, tetapi juga mempertimbangkan aspek ekonomis dan keefektifan. Dengan kata lain aspek pengeluaran pemerintah D.I Yogyakarta menekankan pada optimalisasi manfaat yang akan diterima, di mana hal tersebut dilihat dari peningkatan pelayanan publik dan kemampuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di masa yang akan datang.

Tabel 5: Ringkasan hasil simulasi.

No	Skenario	Variabel	Nilai	Nilai	Nilai	Satuan
		Endogen	Dasar	Simulasi	Perubahan	
1	Pengeluaran pemerintah naik 6%	Y	65492,1	69036,8	5,41	persen
		K	38994,5	39993,7	2,56	persen
		TAB	11860,9	14406,3	21,46	persen
		MSK	16,92	16,5062	-0,4138	persen poin
2	Harga beras turun 5%	Y	65492,1	66778,9	1,96	persen
		K	38994,5	39357,3	0,93	persen
		TAB	11860,9	12785,0	7,79	persen
		MSK	16,92	16,8496	-0,0704	persen poin

Pertumbuhan pengeluaran pemerintah memiliki tren menurun sejak tahun 2002 hingga 2017, tercatat pada tahun 2002 pertumbuhan pengeluaran pemerintah mencapai angka 12 persen dan terus turun hingga pada lima tahun terakhir mencapai rata-rata tumbuh 4,18 persen. Simulasi dilakukan dengan menaikkan jumlah belanja pemerintah sebesar 6 persen. Hasil simulasi pada Tabel 5 menunjukkan bahwa kenaikan belanja pemerintah atau pengeluaran pemerintah sebesar 6 persen mengakibatkan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 5,41 persen. Sedangkan konsumsi rumah tangga meningkat sebesar 2,56 persen dan tabungan masyarakat meningkat sebesar 21,46 persen. Dan persentase penduduk miskin turun sebesar 0,4138 persen poin akibat peningkatan pengeluaran pemerintah.

Berdasarkan RPJMN 2015-2019, telah diidentifikasi beberapa kondisi yang dapat berpengaruh terhadap pembangunan nasional, termasuk pada Provinsi D.I Yogyakarta, yaitu penurunan harga komoditas secara umum. Selain itu, terjadinya peningkatan garis kemiskinan di Provinsi D.I Yogyakarta dalam kurun waktu 2010-2017 disebabkan karena peningkatan harga-harga. Oleh karena itu pemerintah melakukan upaya pengendalian harga bahan pangan dan meningkatkan ketersediaan pangan terutama komoditas bahan pangan pokok seperti beras. Setelah dilakukan simulasi penurunan harga beras sebesar 5 persen, dapat dilihat bahwa dampak penurunan harga beras mengakibatkan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 1,96 persen. Konsumsi rumah tangga meningkat 0,93 persen dan tabungan masyarakat meningkat sebesar 7,79 persen. Selain itu, penurunan harga beras juga mengakibatkan penurunan persentase penduduk miskin hingga 0,0704 persen poin.

4. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum, Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), konsumsi rumah tangga, tabungan masyarakat, pengeluaran pemerintah, penerimaan pajak daerah dan rata-rata harga beras Provinsi D. I Yogyakarta mengalami peningkatan dari tahun 2001 sampai dengan 2017. Sedangkan persentase

penduduk miskin memiliki *trend* menurun. Selain itu, inflasi dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) fluktuatif. Secara parsial, Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), inflasi dan konsumsi periode sebelumnya berpengaruh signifikan dan positif terhadap konsumsi rumah tangga, sedangkan penerimaan pajak berpengaruh negatif signifikan. Pada persamaan kedua, rata-rata harga beras dan persentase penduduk miskin memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap tabungan masyarakat di bank. Persamaan struktural terakhir, variabel yang memengaruhi persentase penduduk miskin secara negatif dan signifikan adalah konsumsi rumah tangga dan pengeluaran pemerintah. Dari keseluruhan simulasi yang dilakukan, simulasi dengan peningkatan pengeluaran pemerintah sebesar 6 persen memberikan hasil yang paling baik dalam meningkatkan perekonomian dan mengentaskan kemiskinan di Provinsi D.I Yogyakarta.

Daftar Pustaka

- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2012). *Basic econometrics*. Tata McGraw-Hill Education.
- Irharni. (2018). Pengaruh jumlah penduduk, pengangguran, dan pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 1986-2015. *Jurnal Pendidikan Dan Ekonomi*, 7(1): 88–97.
- Mankiw, N. G. (2003). *Macroeconomics (8th edition)*. New York (US): Worth Publishers.
- Maulidah, F., & Soejoto, A. (2017). Pengaruh tingkat pendidikan, pendapatan dan konsumsi terhadap jumlah penduduk miskin di provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Pendidikan Dan Kewirausahaan*, 3(2): 227–240.
- Muana, N. (2005). *Makro Ekonomi, Teori, masalah dan kebijakan*. Jakarta (ID): PT. Raja Grafindo Persada.
- Ningsih, E., Amar, S., & Idris. (2013). Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Konsumsi dan Tabungan di Sumatera Barat. *Jurnal Kajian Ekonomi*, 1(2): 261–282.
- [PEMDA DIY] Pemerintah Daerah D.I Yogyakarta. (2013). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) D.I Yogyakarta tahun 2013-2017*. Yogyakarta (ID): Pemerintah Daerah D.I Yogyakarta.
- Sangaji, M. (2009). Fungsi Konsumsi Rumah Tangga di Indonesia (Pendekatan Model Koreksi Kesalahan). *Journal of Indonesian Applied Economics*, 3(2): 150–165.
- Sitanggang, H. (2013). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konsumsi Di Provinsi Sumatera Utara* (PhD Thesis). UNIMED, Medan (ID).
- Sukirno, S. (2004). *Makroekonomi teori pengantar*. Jakarta (ID): PT Raja Grafindo Perkasa.
- Tusianti, E. (2018). *Determinan daya beli Indonesia 2010-2017*. Jakarta (ID): Badan Pusat Statistik.